

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN SATWA  
LIAR AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MENURUT  
CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (CBD) DAN HUKUM  
LINGKUNGAN INDONESIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

**RESTU DELLA AYU PUTRI**  
**1310111172**

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)

DOSEN PEMBIMBING :

1. Dr. H. Ferdi, S.H., M.H
2. Dr. Delfiyanti, S.H., M.H



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2017**

**No.Reg.4969/VIII/I/2017-2018**

# TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN SATWA LIAR AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MENURUT *CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (CBD)* DAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA

(Restu della ayu putri. 131011172 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 63 Halaman, 2017)

## ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. meluasnya kebakaran hutan dan di beberapa wilayah Indonesia akan berdampak pada punahnya spesies satwa liar dan dapat menyebabkan kematian langsung satwa liar. Satwa liar akan terbakar api dan kekurangan oksigen akibat menghirup asap pembakaran. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab negara terhadap perlindungan satwa liar akibat kebakaran hutan menurut *Convention on Biological Diversity (CBD)* dan bagaimana tanggung jawab negara terhadap perlindungan satwa liar akibat kebakaran hutan menurut hukum lingkungan di Indonesia. Dalam penelitian ini metode penelitian hukum yaitu yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka dan sumber data dari undang-undang, artikel dan KBB. Berdasarkan penelitian dinyatakan bahwa di dalam Pasal 6 *Convention on Biological Diversity (CBD)* menelaskan tentang tanggung jawab negara terhadap konservasi keanekaragaman hayati. Konvensi ini mengatur tentang perlindungan keanekaragaman hayati baik secara *ek situ* maupun *in situ*. Sedangkan upaya perlindungan yang dilakukan terhadap satwa liar akibat terjadinya kebakaran hutan adalah perlindungan *ek situ* yaitu perlindungan diluar habitat asli. Perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia juga di atur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati), Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber daya alam keanekaragaman hayati yang dimiliki, karna konvensi tetap mengakui bahwa negara-negara, sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip Hukum Internasional mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, dan tanggung jawab masing-masing negara untuk tidak merusak lingkungan. Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya juga telah mengatur perlindungan satwa liar melalui cara pelestarian alam yaitu berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang terdapat di dalam Pasal 5, serta Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Pasal 47 tentang kehutanan yang mengatur perlindungan hutan dan larangan terhadap perbuatan membakar hutan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara, Perlindungan, Satwa Liar, *Convention on Biological Diversity (CBD)*

# STATE RESPONSIBILITY TO PROTECT WILDLIFE RESULT FOREST FIRES AND LAND BASED THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (CBD) AND LAW ENVIRONMENT IN INDONESIA

(Restu della ayu putri. 1310111172. Law Faculty of Andalas University, 63 Page, 2017)

## ABSTRACT

Indonesia is a rich country in biodiversity and is also known as having a long list of endangered wildlife. widespread forest fires and land in some areas of Indonesia will have an impact on the extinction of wildlife species and can cause direct mortality of wildlife. Wildlife will be burned by fire and lack of oxygen due to inhaling combustion smoke. The problem in this thesis is how the state responsibility for wildlife protection due to forest fires according to the Convention on Biological Diversity (CBD) and how the state responsibility on wildlife protection due to forest fires according to environmental law in Indonesia. in this research method is normative legal research, by examining the library materials and data sources of law, articles and KBBI. Based on the research stated that in Article 6 of the *Convention on Biological Diversity (CBD)* about General measures for Conservation and sustainable use. this Convention provides for the protection of biodiversity both *ex situ* and *in situ*. While the protection of wildlife caused by forest fires is the protection of ecosystems that is protection outside the original habitat. Protection of biodiversity in Indonesia is also regulated in Act No. 5 of 1994 on the Ratification of the United Nations Convention on Biological Diversity (*United Nations Convention on Biological Diversity*). By ratifying the convention, Indonesia will not lose sovereignty over natural resources global biodiversity, because the convention still acknowledge that these countries, in accordance with the UN Charter and principles of International Law sovereign right to exploit natural resources of biodiversity in a sustainable manner, and the responsibility of each country not to damage the environment. Act No. 5 of 1990 about the Convention on Biodiversity and Ecosystems also have the protection of wildlife by means of nature conservation in the form of national parks, forest parks, and natural park, which is contained in Article 5, and Act No. 41 of 1999 Article 47 of the forestry governing forest protection and prohibitions against forest fires deeds.

Keywords: State Responsibility, Protection, Wildlife, *Convention on Biological Diversity (CBD)*.